

Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Upaya Deeskalasi Konflik Israel-Palestina Tahun 2023-2024

The Role of Indonesia's Parliamentary Diplomacy in Deescalating The Israel-Palestine Conflict: An Analysis of Efforts from 2023-2024

Farhan Rizqullah*, Aisyah**

Universitas Mulawarman

Email: * farhanrizqullah.contact@gmail.com, ** aisyahsai puddin@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 12 November 2024
Direvisi: 9 Mei 2025
Disetujui: 23 Mei 2025

doi:10.22212/jp.v16i1.4682

Abstract

The Israel-Palestine conflict has seen a notable escalation following the armed attack by Gaza militias on multiple targets in Israel on October 7, 2023. This event prompted a substantial retaliatory response from Israel, which aimed at both militias and civilian locations in Gaza, further exacerbating an already critical humanitarian crisis in the region. This study aims to analyse the role of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP), the House of Representatives, Republic of Indonesia. (DPR RI) in advocating for Palestinian rights and in efforts to mitigate the escalating conflict from the third quarter of 2023 through 2024. Employing the framework of parliamentary diplomacy, the research investigates the initiatives undertaken by BKSAP in this context. Utilising a descriptive methodology, the research incorporates both primary and secondary data, with a qualitative analysis aimed at providing a comprehensive understanding of the parliamentary diplomatic activities relevant to the Israel-Palestine conflict. The analysis indicate that the parliamentary conducted by BKSAP DPR RI in addressing the de-escalation of the Israel-Palestine conflict proves to be notably effective. The findings reveal that BKSAP's parliamentary diplomacy functions through bilateral and multilateral channels, adhering to three central principles: Access, Trust, and Flexibility. These principles enhance constructive engagement and underscore the effectiveness of Indonesia's parliamentary approach in addressing multifaceted geopolitical challenges. Through this dual-channel approach, BKSAP aligns its diplomacy with the human security dimension, highlighting its relevance in resolving conflicts and supporting Palestine's pursuit of sovereignty

Keywords: *Israel-Palestine Conflict; Parliamentary Diplomacy; BKSAP DPR RI.*

Abstrak

Konflik Israel-Palestina mengalami peningkatan eskalasi yang signifikan menyusul serangan bersenjata oleh milisi Gaza terhadap sejumlah sasaran di Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan ini memicu respons balasan dari Israel yang menasar milisi serta wilayah sipil di Gaza, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak Palestina dan upaya meredakan eskalasi konflik pada periode kuartal ketiga tahun 2023 hingga 2024. Dengan menggunakan pendekatan diplomasi parlementer, penelitian ini mengeksplorasi inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh BKSAP dalam mendukung resolusi konflik. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta menerapkan analisis kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait peran diplomasi parlementer dalam konteks konflik Israel-Palestina. Hasil analisis menunjukkan bahwa diplomasi parlementer yang dilakukan oleh BKSAP DPR RI memiliki efektivitas yang signifikan dalam mendukung upaya de-eskalasi konflik. Diplomasi parlementer BKSAP diimplementasikan melalui jalur bilateral dan multilateral yang

berlandaskan tiga prinsip utama: akses, kepercayaan, dan fleksibilitas. Ketiga prinsip ini memungkinkan terwujudnya keterlibatan yang konstruktif dan memperkuat posisi pendekatan parlementer Indonesia dalam mengatasi tantangan geopolitik yang kompleks. Melalui strategi dual-channel, diplomasi parlementer BKSAP secara konsisten diselaraskan dengan dimensi keamanan manusia, sehingga mempertegas kontribusinya dalam mendukung penyelesaian konflik serta memperjuangkan kedaulatan Palestina.

Kata Kunci: Konflik Israel-Palestina; Diplomasi Parlemen; BKSAP DPR RI.

Pendahuluan

Komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina berakar pada prinsip konstitusional anti-kolonialisme yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.¹ Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menempatkan isu Palestina sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri yang berbasis solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang tertindas. Dukungan tersebut mewujud dalam berbagai bentuk diplomasi aktif di berbagai forum internasional seperti Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta dalam berbagai pernyataan resmi pemerintah yang menegaskan pentingnya penyelesaian dua negara berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel–Palestina mengalami eskalasi yang signifikan setelah kelompok bersenjata dari Gaza, melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Israel.² Aksi ini dibalas oleh Israel melalui invasi militer dan gempuran udara yang tidak hanya menargetkan kelompok bersenjata, tetapi juga menyasar wilayah sipil di Gaza, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. Lebih dari 32.000 orang dilaporkan tewas, termasuk mayoritas warga Palestina di Gaza.³ Selain itu, jutaan warga terpaksa menjadi pengungsi internal dan puluhan ribu korban mengalami luka-luka.⁴ Situasi serupa juga terjadi di Tepi Barat di mana ratusan warga Palestina dilaporkan ditahan oleh otoritas Israel.⁵

Di tengah situasi tersebut, Indonesia tidak hanya menyuarakan dukungan moral, tetapi juga aktif mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomatik. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai aktor utama praktik diplomasi di Indonesia secara terbuka menegaskan pentingnya solusi yang sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengakhiri konflik ini.

Di sisi lain, guna memperkuat posisinya di kancah internasional dan menjaga komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat, lembaga parlemen ikut hadir sebagai penghubung utama. Parlemen bertindak sebagai saluran aspirasi publik yang menerjemahkannya ke dalam

- 1 Gilang Lukman, "Whither Israel's Annexation Plan: An Indonesian Perspective," *Indonesian Quarterly* 48, no. 4 (2020): 322-348.
- 2 Jason Burke, "A Deadly Cascade: How Secret Hamas Attack Orders Were Passed Down at Last Minute," *The Guardian*, 7 November 2023, diakses 10 September 2024, <https://www.theguardian.com/world/2023/nov/07/secret-hamas-attack-orders-israel-gaza-7-october>
- 3 Committee to Protect Journalists, "Journalist Casualties in the Israel-Gaza War," 13 Oktober 2023, diakses 21 November 2024, <https://cpj.org/2024/02/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/>
- 4 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Reporter Impact since 7 October 2023," 17 Juni 2024, diakses 22 Agustus 2024, <https://www.ochaopt.org/>
- 5 Ikrame Kouachi, "Number of Palestinians killed in West Bank since Oct. 7 stands at 288 as Israeli army kills young man," *Anadolu Ajansi*, 16 Desember 2023, diakses 4 Oktober 2024, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/number-of-palestinians-killed-in-west-bank-since-oct-7-stands-at-288-as-israeli-army-kills-young-man/3084375>

kebijakan yang relevan. Selain itu, parlemen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab atas kebijakan domestik maupun internasional.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga parlemen juga memuat mandat sebagai aktor dalam diplomasi parlemen. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang aktif memobilisasi dukungan internasional untuk mengancam tindakan agresi Israel. Ruang gerak lembaga tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta Pasal 69 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang memberikan DPR RI fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran yang digunakan untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dalam isu-isu strategis, termasuk konflik Israel-Palestina.⁶

Dalam praktiknya, BKSAP berkolaborasi dengan berbagai parlemen dunia, termasuk di antaranya dengan legislator negara sahabat untuk menggalang solidaritas bagi Palestina. Misalnya, pertemuan antara Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon dengan Jeremy Corbyn, perwakilan independen sekaligus mantan pemimpin Partai Buruh pada 2015-2020 di parlemen Inggris, menunjukkan bahwa diplomasi parlemen Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga merangkul dukungan kolektif dari individu dan kelompok yang memiliki solidaritas terhadap Palestina.⁷

DPR RI, melalui fungsi *checks and balances*, juga mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani konflik internasional dengan prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internasional, DPR RI mampu mendukung diplomasi pemerintah melalui diplomasi parlemen yang memiliki karakter fleksibel dan adaptif terhadap situasi global yang dinamis.⁸

Kendati begitu, masih terdapat kesenjangan dalam kajian akademik mengenai efektivitas diplomasi parlemen Indonesia dalam konteks penyelesaian konflik global. Literatur lebih banyak berfokus pada diplomasi formal antarnegara, sementara peran institusi legislatif sering kali terabaikan. Padahal, diplomasi parlemen memiliki dimensi-dimensi tertentu yang mampu menjangkau aktor-aktor non-negara serta publik internasional dengan pendekatan berbasis solidaritas dan representasi. Dengan kata lain, mengabaikan peran parlemen menciptakan celah penting dalam studi hubungan internasional, karena analisis kebijakan luar negeri yang hanya melihat perspektif eksekutif menjadi tidak utuh tanpa mempertimbangkan peran legislatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BKSAP DPR RI dalam merespons eskalasi konflik Israel-Palestina tahun 2023–2024. Fokus utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan, mengevaluasi efektivitasnya dalam menggalang dukungan internasional, serta menelaah kontribusi diplomasi parlemen terhadap upaya deeskalasi konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai diplomasi parlemen Indonesia serta meningkatkan pemahaman publik.

6 DPR RI, Buku Panduan Anggota BKSAP 2019-2024 (Jakarta: DPR RI, 2019).

7 DPR RI, Laporan Delegasi BKSAP DPR RI Ke 147th IPU General Assembly and Related Meetings, Luanda, 2023, diakses 20 September 2024, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/bksap-16-fa1788f392b2e84d376533cc317e1d0f.pdf>.

8 Poltak Partogi Nainggolan, *Diplomasi Parlemen* (Jakarta: Pustaka Obor, 2020), 25.

Konsep Diplomasi Parlemen

Diplomasi parlemen merupakan serangkaian aktivitas internasional yang dijalankan oleh anggota legislatif untuk meningkatkan pemahaman antarnegara, memperkuat pengawasan pemerintah, mewakili rakyat, serta meningkatkan legitimasi demokratis institusi antar-pemerintah. Sebagai konsep, diplomasi parlemen tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjembatani kerja sama pada isu-isu global yang membutuhkan pengambilan keputusan berbasis keterwakilan luas dan kolektif. Menurut Weisglas dan de Boer (2007), diplomasi parlemen penting dalam mendekatkan aktor-aktor politik lintas negara melalui dialog langsung yang lebih fleksibel dibandingkan diplomasi tradisional. Diplomasi parlemen mampu menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka, di mana nilai-nilai demokrasi, kepentingan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijakan internasional dapat berjalan secara seimbang.⁹

Diplomasi parlemen juga berbeda dari bentuk diplomasi lain, khususnya diplomasi publik. Perbedaan ini terletak pada cara pihak-pihak yang terlibat menjalankan mandat demokrasi. Sebagai wakil rakyat, para aktor diplomasi parlemen tidak hanya bertindak atas nama negara, tetapi juga merepresentasikan suara dan kepentingan konstituennya.¹⁰ Hal ini menjadikan mereka memiliki legitimasi yang unik, yang mampu memperkuat posisi dalam negosiasi internasional sekaligus menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam isu-isu lintas batas. Pendekatan ini memungkinkan diplomasi parlemen berkontribusi pada stabilitas politik internasional melalui penguatan nilai-nilai keterwakilan dan akuntabilitas.

Selain itu, sifat demokratis diplomasi parlemen juga mencakup aspek advokasi dan tekanan institusional. Hal ini terlihat ketika para legislator bekerja sama mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan pendekatan persuasif, advokasi, dan tekanan institusional untuk memperjuangkan kepentingan bersama.¹¹ Aktivitas ini memberikan ruang bagi para legislator untuk tidak hanya mengemukakan pandangan mereka terkait kebijakan, tetapi juga untuk membangun konsensus di antara berbagai negara dalam mengatasi tantangan global. Selain itu, diplomasi parlemen juga mencakup kegiatan dan aktivitas multilateral yang melibatkan kerangka lembaga parlemen internasional. Dalam konteks ini, parlemen dari berbagai negara dapat berdiskusi tentang isu-isu global, mengagas solusi bersama, dan memperkuat kerja sama lintas batas. Singkatnya, diplomasi parlemen adalah cara di mana dua atau lebih parlemen melakukan dialog berkelanjutan mengenai isu-isu internasional yang krusial.¹²

Pada dasarnya, diplomasi parlemen mencakup beberapa sifat penting yang membuatnya unik dan berbeda dari diplomasi konvensional. Jeffrey Robertson dalam jurnal yang berjudul *North Korean nuclear issues and the role of parliamentary diplomacy* mengklasifikasikan sifat-sifat diplomasi parlemen menjadi empat dimensi: akses (*access*), kepercayaan (*trust*), fleksibilitas (*flexibility*), dan eksplorasi non-komitmen (*non-committal exploration*).

Pertama, legislator memiliki akses khusus dalam berkoordinasi langsung dengan pemangku kebijakan di negara-negara mitra, ini memungkinkan mereka terlibat dalam diplomasi lintas

9 Gonnée de Boer and Frans Weisglas, "Parliamentary Diplomacy," *The Hague Journal of Diplomacy*, Vol. 2-2007 (1 Januari 2007): 93-99, <https://doi.org/10.1163/187119007X180494>

10 Mohammed Salman Tayle, and Ibrahim Mohammad Dashti, "Parliament and Foreign Policy-Making Process," *Asian Social Science* 14, no. 2 (29 Januari 2018): 165-172, <https://doi.org/10.5539/ass.v14n2p165>

11 Zlatko Šabić, "Building Democratic and Responsible Global Governance: The Role of International Parliamentary Institutions," *Parliamentary Affairs* 61, no. 2 (5 Februari 2008): 255-271, <https://doi.org/10.1093/pa/gsm062>

12 Mirsada Hallunaj, "Parliamentary Diplomacy as a Helpful Instrument in Foreign Policy." *Institute for Cultural Diplomacy*, 2005, diakses 25 September 2024, <https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Parliamentary%20Diplomacy%20as%20a%20Helpful%20Instrument%20in%20Foreign%20Policy.pdf>

batas dengan lebih cepat dan langsung. Kedua, legislator memiliki akses berupa mandat yang diberikan oleh publik dalam statusnya sebagai wakil rakyat. Hal ini membuat diplomasi parlemen unik, mengingat mereka memiliki otoritas langsung yang dipercayakan oleh konstituen, berbeda dengan diplomat pemerintah yang lebih formal dan terbatas dalam akses publik.

Tabel 1. Klasifikasi Diplomasi Parlemen

Sifat	Fungsi
<i>Access</i> (Akses)	Parlemen memiliki akses yang spesial untuk berkoordinasi dengan pemangku kebijakan di negara-negara mitra
<i>Trust</i> (Kepercayaan)	Legislator mendapatkan kepercayaan yang khusus dari Kemlu dalam menjalankan aktivitas diplomasi dan secara status berbeda dengan diplomat pada umumnya, yang sebagai wakil pemerintah cenderung jauh dari publik, hal ini karena legislator memiliki mandat langsung sebagai wakil rakyat untuk memegang otoritas yang besar.
<i>Flexibility</i> (Fleksibilitas)	Sifat fleksibel yang dimiliki oleh legislator dapat membantu dalam mencari perspektif lain dan inovasi dalam masalah-masalah internasional, sebagai contoh, mereka dapat melibatkan LSM dalam membantu upaya mereka.
<i>Non-committal exploration</i> (Eksplorasi tanpa komitmen)	Legislator dapat digunakan oleh pemerintah untuk menggali isu-isu non-komitmen yang cenderung sensitif dan mengikat pemerintah dengan negara mitra. Selain itu, <i>access</i> , <i>trust</i> , dan <i>flexibility</i> dapat digunakan pemerintah tanpa terlihat terikat ketika dihadapkan pada isu-isu domestik maupun internasional.

Sumber: Robertson, 2007

Pertama, legislator memiliki akses khusus dalam berkoordinasi langsung dengan pemangku kebijakan di negara-negara mitra, ini memungkinkan mereka terlibat dalam diplomasi lintas batas dengan lebih cepat dan langsung. Kedua, legislator memiliki akses berupa mandat yang diberikan oleh publik dalam statusnya sebagai wakil rakyat. Hal ini membuat diplomasi parlemen unik, mengingat mereka memiliki otoritas langsung yang dipercayakan oleh konstituen, berbeda dengan diplomat pemerintah yang lebih formal dan terbatas dalam akses publik.

Ketiga, fleksibilitas, yang memungkinkan legislator untuk lebih leluasa menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat sipil dalam menangani isu-isu internasional. Sebagai contoh, legislator dapat menggalang dukungan atau mengadvokasi isu-isu yang cenderung kompleks dengan melibatkan aktor non-pemerintah yang relevan, sehingga dapat memperkaya perspektif dan pendekatan dalam diplomasi. Keempat, eksplorasi non-komitmen, legislator dapat berperan dalam menggali isu-isu sensitif yang mungkin sulit dihadapi secara langsung oleh diplomat pemerintah, seperti isu-isu yang memerlukan kehati-hatian ekstra tanpa komitmen formal dari pemerintah. Peran ini memberikan fleksibilitas kepada negara untuk menelaah situasi tanpa menimbulkan konsekuensi politik yang signifikan.¹³

Sementara itu, sifat keempat yaitu eksplorasi non-komitmen cenderung kurang relevan untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang secara konsisten dan terbuka mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik di tingkat parlemen maupun eksekutif. Isu Palestina bukanlah isu yang perlu dieksplorasi secara hati-hati atau tidak mengikat, karena sudah menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, memasukkan elemen ini dalam analisis justru berisiko membuat pembahasan terkesan berulang tanpa menambah

13 Jeffrey Robertson, *North Korean Nuclear Issues and the Role of Parliamentary Diplomacy*, Research Note No. 23 (Canberra: Parliamentary Library, 2007).

nilai strategis.

Ketiga sifat di atas akan menjadi landasan analisis bagaimana BKSAP DPR RI berperan aktif dalam menggalang solidaritas internasional dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. Sebagai alternatif yang melengkapi diplomasi formal pemerintah, diplomasi parlemen menawarkan pendekatan yang lebih adaptif, representatif, dan berbasis solidaritas dalam merespons isu kemanusiaan seperti konflik Israel–Palestina.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), sementara analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran diplomasi parlemen Indonesia dalam upaya deeskalasi konflik Israel-Palestina pada tahun 2023-2024. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara holistik dan interpretatif. Sebagai landasan teori, penelitian ini mengadopsi konsep diplomasi parlemen yang dirumuskan oleh Robertson (2007), yang dianggap relevan untuk memahami dinamika diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI. Metode alternatif lain, seperti kuantitatif, tidak dipilih karena tidak sesuai untuk menggali aspek-aspek mendalam dari praktik diplomasi parlemen dalam konteks ini.

Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Isu Palestina: Perspektif Kebijakan Luar Negeri dan Identitas Nasional

Indonesia memiliki hubungan historis yang kuat terkait isu Palestina-Israel, dengan posisi pemerintah dan opini publik yang cenderung kritis terhadap Israel. Sejak kemerdekaan Israel pada 1948, Indonesia menolak menjalin hubungan dengan Israel dan konsisten mendukung hak-hak Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina didasari oleh prinsip kemerdekaan dan hak asasi manusia (HAM), yang diwujudkan melalui komitmen di berbagai forum internasional, termasuk PBB, OKI, dan GNB.

Pada kuartal terakhir 2023, eskalasi terbaru dalam konflik Israel-Palestina muncul akibat beberapa pemicu yang signifikan, termasuk serangan Hamas pada Nova Music Festival yang menyebabkan ratusan korban jiwa, dan kunjungan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Al-Aqsa, yang dinilai provokatif dan melanggar status quo kawasan. Pada kasus kunjungan Ben-Gvir ke Al-Aqsa pemerintah mengeluarkan empat parameter dalam rilis persnya, diantaranya: (1) Israel dinilai telah melakukan tindakan provokatif berulang kali yang dapat memperburuk stabilitas dan keamanan di kawasan; (2) Indonesia secara tegas mengecam kunjungan Menteri Israel ke Kompleks Al-Aqsa, menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan status quo Yerusalem; (3) Indonesia mendesak Israel untuk menghormati status quo Yerusalem dan menghentikan segala tindakan yang berpotensi memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut; dan (4) Indonesia kembali menekankan pentingnya proses perdamaian Palestina-Israel melalui solusi dua negara sesuai dengan parameter internasional yang ada.

Sementara itu, dalam merespon serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pemerintah Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, turut memberikan tanggapan. Melalui Kemlu, Indonesia menyampaikan sikapnya terkait serangan Hamas terhadap Israel serta krisis kemanusiaan yang terjadi setelahnya, baik di Palestina secara umum maupun di Gaza secara khusus. Sikap

pemerintah Indonesia terdiri dari tiga poin utama: (1) Indonesia menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina dan Israel; (2) Indonesia mendesak agar kekerasan segera dihentikan guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban; dan (3) Indonesia menegaskan bahwa akar permasalahan, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati di PBB.¹⁴ Dalam merespons insiden Al-Aqsa, Kemlu mengeluarkan pernyataan diplomatik yang mengecam tindakan provokatif Israel, yang dianggap dapat mengancam stabilitas kawasan dan menghancurkan peluang perdamaian. Sementara itu, pada saat menanggapi serangan Hamas terhadap Israel, Kemlu menggunakan istilah "prihatin".¹⁵¹⁶ Penggunaan kata prihatin menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dan pembedaan bahasa diplomatik, ini menggambarkan strategi politik luar negeri Indonesia yang cermat dan berbasis konteks dalam menghindari ketegangan lebih lanjut, namun tetap menunjukkan dukungan terhadap hak-hak Palestina.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri sejak masa Presiden Sukarno, yang memandang perjuangan Palestina sebagai bagian dari agenda anti-kolonialisme dan solidaritas pan-Islam. Sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam melawan kolonialisme, Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme. Dalam perspektif hubungan internasional, dukungan terhadap Palestina merefleksikan prinsip konstruktif, di mana identitas nasional Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dan pengalaman sejarahnya menjadi dasar dalam membangun hubungan dengan Palestina.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terdapat upaya signifikan untuk mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk pragmatisme dalam kebijakan luar negeri. Gus Dur berargumen bahwa hubungan dengan Israel dapat menjadi sarana dialog dan promosi perdamaian di Timur Tengah. Namun, inisiatif ini tidak mendapatkan dukungan luas dari publik Indonesia yang umumnya memiliki sentimen kuat terhadap Palestina, ini menunjukkan bagaimana faktor domestik turut membentuk kebijakan luar negeri.¹⁷

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, konsep Formula 4+1 diperkenalkan sebagai sasaran strategis Kemlu, formula ini terdiri dari empat elemen utama: diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global, serta diplomasi perlindungan. Elemen "plus satu" menekankan pada penguatan infrastruktur diplomasi Indonesia untuk meningkatkan peran Indonesia di kanvas internasional.¹⁸ Dalam konteks ini, elemen ketiga sangat relevan dengan sikap Indonesia terhadap upaya deeskalasi konflik Israel-Palestina pada periode 2023-2024. Hal ini tercermin dalam upaya

14 Asri Mayang Sari, "Indonesia Prihatin Atas Peningkatan Eskalasi Konflik Palestina-Israel," *Antara News*, 8 Oktober 2023, diakses 19 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3762543/indonesia-prihatin-atas-peningkatan-eskalasi-konflik-palestina-israel>

15 Khalil Assali, "Ben-Gvir's Incendiary Moves and Statements about Jewish Prayer at al-Haram al-Sharif Raise Alarm over Status Quo," *Jerusalem Story Project*, 28 Agustus 2024, diakses 29 Agustus 2024, <https://www.jerusalemstory.com/en/article/ben-gvirs-incendiary-moves-and-statements-about-jewish-prayer-al-haram-al-sharif-raise>

16 Kemlu, "Indonesia mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 5 Januari 2023, diakses 22 Agustus 2024, <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4354/berita/indonesia-mengutuk-kunjungan-menteri-keamanan-nasional-israel-ke-komplek-masjid-al-aqsa-0301>

17 David, et al, "Pluralisme dan Toleransi: Hubungan Dagang Gus Dur Dengan Israel," *IC-TiarS: International Conference on Tradition and Religious Studies* 3, no. 1 (18 Agustus 2024): 54-64, <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/1186/905>

18 Irfan Setiawan, dan Ragil Rencoko Mahesa Putra Nainggolan, "Eskalasi Konflik Palestine-Israel Di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 17, no. 1 (19 Juni 2024): 248-63, <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.52392>

Indonesia untuk mempertahankan posisi diplomatik pro-Palestina dengan aktif menyuarakan isu ini di berbagai forum internasional. Jika dibandingkan dengan kebijakan luar negeri di era Presiden Sukarno yang lebih konfrontatif terhadap isu-isu internasional, situasi global pada tahun 2024 menuntut pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan adaptif.

Diplomasi Parlemen Indonesia pada Konflik Israel-Palestina Tahun 2023-2024 di Tingkat Bilateral

Dalam upaya menguatkan diplomasi bilateral dengan Palestina, BKSAP DPR RI membentuk GKSB DPR RI-Palestina sebagai kelompok kerja khusus. Sebagai kelompok kerja, GKSB DPR RI berperan sebagai inisiatif kolaboratif yang memperluas jangkauan diplomasi dalam menyuarakan kepentingan Indonesia. Meskipun demikian, GKSB bukan merupakan alat kelengkapan permanen dalam struktur DPR, kelompok ini berada di bawah koordinasi BKSAP dan menjalankan peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral antarpemerintah, yang kian relevan di tengah meningkatnya kebutuhan untuk merespons isu-isu internasional yang beragam. Dengan demikian, GKSB berfungsi sebagai sarana diplomasi untuk membangun persahabatan serta merespon isu lintas batas yang berpengaruh pada kepentingan Indonesia.¹⁹

Dalam praktiknya, GKSB bertujuan untuk meningkatkan dialog antarpemerintah yang berfokus pada isu-isu krusial seperti demokrasi, Sustainable Development Goals (SDGs), kesetaraan gender, lingkungan hidup, HAM, keamanan manusia, kejahatan transnasional, dan pemberantasan korupsi.²⁰ Dalam konteks isu keamanan manusia di Palestina, Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina bukan hanya pertentangan ideologis melainkan penindasan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Pandangan ini mencerminkan sikap DPR RI yang mendukung Palestina dalam upaya diplomasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka.²¹

Pernyataan ini relevan dengan pandangan Mary Kaldor dalam *Human Security. Society and Economy*, yang menjabarkan keamanan manusia terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu keamanan manusia berkaitan dengan keamanan individu dan komunitas di lingkungan sekitar; keamanan manusia sebagai hubungan antara kebebasan dari rasa takut, serta bebas dari ketidakamanan fisik dan material; keamanan manusia sebagai keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam diplomasi parlemen Indonesia terhadap upaya deeskalasi konflik Israel-Palestina.²²

Relevan dengan prinsip keamanan manusia, GKSB memiliki mandat khusus dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina di tingkat global. Sebagai bagian dari 102 GKSB yang dibentuk oleh DPR RI, GKSB DPR RI-Palestina berfokus pada diplomasi kemanusiaan dan penyelesaian konflik di wilayah tersebut, kelompok kerja ini dipimpin oleh Dr. Syahrul Aidi Ma'azat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) pada periode 2019-2024.²³ Kelompok ini aktif dalam mengidentifikasi dan menganalisis dinamika konflik serta menjalin kolaborasi dengan negara-negara lain yang memiliki kepedulian terhadap isu Palestina.

19 DPR RI, *Selayang Pandang Grup Kerja Sama Bilateral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta: DPR RI, 2020).

20 Ibid.

21 Fadli Zon, "Why Indonesia can't normalize relations with Israel," *The League of Parliamentarians for Al Quds (LP4Q)*, 28 Desember 2020. Diakses 1 September 2024, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BKSAP-2-aaeb5b5449930f3a82d3f2760d4ece0.pdf>

22 Mary Kaldor, "Human Security, Society and Economy", no. 3 (2011): 441-48, <http://www.jstor.org/stable/41472170>.

23 DPR RI, "Palestina - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)"

Tujuan utama GKSB DPR RI-Palestina adalah untuk menguatkan hubungan bilateral melalui jalur parlemen, terutama dalam menyokong perjuangan rakyat Palestina. Bentuk dukungan ini mencakup diskusi, pertukaran informasi, serta kolaborasi dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki posisi serupa terkait isu Palestina. Dialog antarparlemen ini juga dilengkapi dengan kesempatan untuk bertemu kabinet negara mitra saat kunjungan bilateral, tanpa melanggar regulasi.²⁴

Hubungan kerja sama antara GKSB DPR RI dan Parlemen Palestina pertama kali terjalin pada tahun 2016. Ketika DPR RI merencanakan kunjungan ke Palestina, hambatan administratif dari pemerintah Israel mengharuskan pertemuan dipindahkan ke Yordania. Walau terdapat jeda selama empat tahun, hubungan ini kembali aktif pada tahun 2020 melalui koordinasi bersama Kemlu dan Kedutaan Besar Palestina di Indonesia terkait rencana aneksasi Israel (DPR RI, n.d). Pada tahun 2022, hubungan bilateral diperkuat melalui pertemuan bersama Palestinian National Council (PNC) di Yordania sebagai bentuk dukungan nyata Indonesia bagi rakyat Palestina.

Tabel 2

Tanggal	Agenda	Hasil Pertemuan
10 Oktober 2023	<i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP dan GKSB DPR RI – Parlemen Palestina dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia	Pimpinan BKSAP DPR RI, Fadli Zon dan Ketua GKSB Palestina, DR. Syahrul Aidi Ma'azat menerima Dubes Palestina untuk Indonesia guna membahas eskalasi terbaru (Serangan 7 Oktober) dan menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina
1 November 2023	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Bulan Solidaritas Palestina GKSB DPR RI – Parlemen Palestina bekerja sama dengan <i>Aqsa Working Group</i>	Menghasilkan lima poin rekomendasi terhadap situasi dan eskalasi terbaru pada konflik Israel-Palestina
27 November 2023	Pertemuan bilateral delegasi BKSAP DPR RI dengan Parlemen Palestina di sela-sela Sidang APA di Ankara	Delegasi Palestina mengapresiasi dukungan nyata Indonesia seperti pendirian Rumah Sakit Indonesia dan bantuan kemanusiaan di Gaza.
3 Juli 2024	<i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Palestina H.E. Dr. Zuhair Al-Shun	Membahas situasi terbaru di Palestina dan apresiasi Dubes Palestina terhadap dukungan DPR RI yang telah aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada berbagai organisasi Parlemen Internasional
3 Juli 2024	Audiensi Pimpinan BKSAP DPR RI dengan <i>Aqsa Working Group</i>	Membahas rencana dan eksekusi pembangunan RS Ibu Anak di Gaza Palestina. Membahas inisiasi penyelenggaraan acara Bulan Solidaritas Palestina 2024. Membahas inisiasi pembentukan <i>Palestine Corner</i> di lingkungan DPR RI sebagai pusat informasi dan kegiatan terkait Palestina.
3 Juli 2024	Pertemuan Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Delegasi Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina (UN CEIRPP)	UN CEIRPP meminta dukungan parlemen Indonesia untuk menggalang dukungan parlemen dunia dalam pembentukan Komite Khusus (<i>Ministerial Committee</i>) untuk Palestina di PBB.

Sumber: DPR RI, n.d.

24 Tide Aji Pratama, "Peran Diplomasi Parlemen Indonesia Terkait Isu Palestina Tahun 2023-2024" Wawancara, 2024, <https://youtu.be/b2dMcWanJrY?si=qHfmS4NxIArKNLQX>

Selama Oktober 2023 hingga Juli 2024, GKSB DPR RI-Palestina telah melaksanakan berbagai agenda diplomasi, termasuk audiensi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, FGD dengan Aqsa Working Group (AWG), dan dialog dengan perwakilan dari Komite PBB untuk Palestina (UN CEIRPP). Tabel kronologis agenda bilateral antara GKSB DPR RI dan Parlemen Palestina di atas menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam mengawal hak-hak Palestina di level internasional.

BKSAP DPR RI juga melakukan diplomasi parlemen dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pemerintah Israel. Pada Juni 2024, BKSAP menerima kunjungan delegasi The House Democracy Partnership (HDP) dari Kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh Rep. Nicholas J. Rahall. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Sukamta yang memimpin pertemuan tersebut, menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza. Seruan Dr. H. Sukamta rupanya diterima dengan baik oleh Senator Rahall, yang secara pribadi menyetujui bahwa krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza harus segera diakhiri secepatnya. Meskipun demikian, menurutnya pemerintah Amerika Serikat memiliki logikanya sendiri dalam mengambil keputusan. Upaya-upaya seperti ini bertujuan untuk memengaruhi pandangan internasional dengan menyoroti HAM yang terabaikan di Palestina dan mendorong penghentian agresi Israel.²⁵

Selain upaya formal, BKSAP DPR RI juga menjalin kerja sama dengan LSM seperti AWG untuk meningkatkan kesadaran publik tentang situasi di Palestina melalui Bulan Solidaritas Palestina (BSP) yang diadakan sejak tahun 2021. BSP diharapkan dapat menggalang dukungan dari masyarakat luas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dalam BSP tahun 2023, BKSAP DPR RI turut melibatkan organisasi dalam dan luar negeri, kementerian terkait, perwakilan diplomatik negara sahabat, serta para tokoh nasional melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkuat dukungan publik atas isu Palestina.²⁶ Hasil dari FGD tersebut melahirkan lima poin rekomendasi, diantaranya adalah:

1. Menggalang sikap tegas menolak segala bentuk penodaan serta rencana Zionis Israel untuk membagi Masjid Al-Aqsa dan menghilangkan hak umat Islam di situs suci tersebut.
2. BKSAP dan Pemerintah Indonesia terus memantau implementasi Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan Gaza PBB demi terwujudnya perdamaian di Palestina, serta mendukung percepatan pembukaan koridor kemanusiaan menuju Jalur Gaza, mengingat semakin gentingnya situasi krisis.
3. Menyerukan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan Palestina, yang menjadi korban terbesar dalam agresi Israel, melalui program bantuan khusus yang ditujukan untuk mereka.
4. Memperkuat narasi kepada masyarakat nasional maupun internasional bahwa konflik Palestina bukanlah Islam kontra Yahudi, melainkan ‘masyarakat yang terjajah’ melawan ‘penjajah’. Bahwa Hamas adalah ‘pejuang’ yang berupaya mengembalikan hak-hak yang telah dirampas.
5. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada para pengungsi Palestina di Indonesia dan memperhatikan kesejahteraan mereka, baik dalam pendidikan maupun kesehatan.²⁷

25 DPR RI, “Seruan DPR terhadap AS perintahkan Israel hentikan genosida di Gaza,” *DPR RI*, 19 Juni 2024, diakses 25 September 2024, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50098>

26 DPR RI, “Palestina - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)”

27 Poin Rekomendasi Focus Group Discussion (FGD) Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2023, *Aqsa Working Group*, diakses 25 September 2024, <https://aqsaworkinggroup.com/2023/11/02/poin-rekomendasi-focus-group-discussion->

Di samping itu, BKSAP DPR RI menghadapi tantangan diplomasi, terutama dalam upaya mengadvokasi Palestina kepada mitra yang terkait erat dengan kepentingan Israel, seperti Amerika Serikat. Walaupun BKSAP DPR RI berhasil menggalang dukungan secara pribadi dari anggota Kongres AS terhadap isu Palestina, kebijakan pemerintah Amerika Serikat tetap menjadi penghalang dalam upaya advokasi ini. Hal ini menegaskan bahwa meskipun diplomasi parlemen berhasil mendapatkan perhatian secara individu, dukungan terhadap Palestina membutuhkan kolaborasi lebih lanjut di tingkat kebijakan formal antarnegara.

Diplomasi Parlemen Indonesia pada Konflik Israel-Palestina Tahun 2023-2024 di Tingkat Multilateral

Selain aktif dalam diplomasi bilateral, BKSAP DPR RI juga memainkan peranan penting secara multilateral melalui berbagai organisasi antar-parlemen global, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).²⁸ Partisipasi Indonesia dalam diplomasi parlemen multilateral telah terjalin sejak keanggotaan IPU yang dimulai pada tahun 1959. Keanggotaan ini sangat signifikan, mengingat IPU adalah organisasi induk dari forum antar-parlemen global yang diakui secara resmi oleh seluruh negara. Selain itu, IPU memiliki status sebagai pengamat dan hak istimewa di PBB, yang memungkinkannya untuk mendistribusikan dokumen resmi di Majelis Umum PBB, menegaskan pentingnya dimensi parlementer dalam sistem PBB. Melalui IPU, Indonesia telah secara konsisten mengadvokasi kemerdekaan Palestina melalui partisipasi dalam sidang-sidang tahunan IPU.²⁹

Pada sidang IPU ke-147 yang berlangsung di Luanda, Angola, pada tahun 2023, Indonesia berkolaborasi dengan Algeria, Kuwait, Afrika Selatan, dan Iran untuk mengajukan 12 poin resolusi yang berjudul "Stopping the War and Violations of Human Rights in Gaza." Usulan resolusi ini mendapatkan dukungan mayoritas, dengan 58% suara. Namun, tidak satu pun dari usulan Emergency Item yang diajukan dapat diadopsi, karena tidak memenuhi ambang batas 66.6%, termasuk usulan resolusi gabungan Indonesia dan negara lain.³⁰ Sebuah insiden menarik terjadi pada sidang tersebut, di mana Presiden IPU, Duarte Pacheco, dianggap menunjukkan bias dengan mendukung rezim Zionis dan menyalahkan Palestina sebagai tindakan teroris. Menanggapi sikap tersebut, beberapa delegasi negara Islam, termasuk Iran, melakukan walkout sebagai bentuk protes.³¹

Selanjutnya, pada sidang IPU ke-148 di Jenewa, Swiss, pada 23 Maret 2024, BKSAP DPR RI kembali mengajukan emergency item yang berisi 20 poin resolusi, berkolaborasi dengan Malaysia untuk mengusulkan "Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine". Sebelum usulan ini, parlemen Israel juga telah mengajukan emergency item mengenai "The Immediate Release of the Hostages in Gaza," yang diterima oleh Majelis pada 22 Maret 2024.³² Didasari

fgd-pembukaan-bulan-solidaritas-palestina-2023/

28 Kemlu, "Inter-Parliamentary Union (IPU)"

29 Ibid.

30 IPU. Request Submitted by the Delegations of Algeria and Kuwait on Behalf of the Arab Group, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), and South Africa on Behalf of the African Group, *Emergency Item, 147th Assembly, 2023*, diakses 15 September 2024, <https://www.ipu.org/file/17812/download>

31 Tehran Times, "Biased pro-Israeli remarks trigger walkout at IPU meeting," 24 Oktober 2023, diakses 27 September 2024, <https://www.tehrantimes.com/news/490535/Biased-pro-Israeli-remarks-trigger-walkout-at-IPU-meeting>

32 IPU, *148th IPU Assembly and Related Meetings*. IPU, Geneva, 2024, diakses 8 Oktober 2024, <https://www.ipu.org/file/19187/download>

oleh simpati terhadap rakyat Palestina, Indonesia, Iran, dan negara-negara Muslim lainnya melakukan walkout sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap presentasi emergency item Israel, yang dianggap sebagai pembelaan atas tindakan genosida terhadap rakyat Palestina.³³

Prestasi Indonesia dalam forum antar-parlemen juga tercermin dalam terpilihnya BKSAP DPR RI sebagai anggota Komite Eksekutif IPU, mewakili Asia-Pasifik, pada sidang IPU ke-147 secara aklamasi. Keanggotaan dalam Komite Eksekutif memberikan keuntungan besar bagi Indonesia untuk menyuarakan isu Palestina, mengingat komite ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus IPU.³⁴ Indonesia memanfaatkan statusnya dalam Komite Eksekutif pada Pertemuan ke-293 di Zanzibar, Tanzania, pada Juni 2024, di mana BKSAP DPR RI meminta Sekretariat Jenderal IPU untuk memberikan laporan berkala mengenai persiapan keberangkatan delegasi IPU ke Rafah, Gaza, untuk mendukung gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Selain isu Palestina, BKSAP DPR RI juga membahas pengalokasian dana Solidaritas Parlemen yang ditujukan untuk membantu parlemen-parlemen yang mengalami kesulitan finansial dalam berpartisipasi di IPU.³⁵

Di samping keterlibatannya dalam IPU, BKSAP DPR RI juga aktif dalam forum antar-parlemen Asia, seperti Asian Parliamentary Assembly (APA). Pada sesi pleno APA ke-12 di Antalya, Turki, pada tahun 2019, DPR RI secara tegas mendukung adopsi resolusi APA mengenai Dukungan Parlemen Asia untuk Rakyat Palestina, yang menjadi langkah proaktif dalam memprotes pendudukan Israel dan mengajak negara-negara Asia untuk turut serta dalam menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Konsistensi dukungan dari legislator APA terhadap kemerdekaan Palestina mencerminkan solidaritas yang kuat dan pemahaman bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁶

Pada sesi pleno APA ke-13 di Antalya, Turki, pada tahun 2023, Indonesia, diwakili oleh Ketua BKSAP DPR RI, berhasil terpilih sebagai Pimpinan Sidang APA. Dalam kapasitas ini, BKSAP DPR RI menginisiasi pembentukan komisi khusus yang akan menangani isu Palestina, dengan tujuan melakukan upaya diplomasi parlemen untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, dan melakukan investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel. Ketua BKSAP DPR RI secara langsung mengetok palu dan mendeklarasikan berdirinya Komisi Palestina APA, di mana Indonesia juga ditunjuk sebagai *rapporteur*.³⁷ Sebagai *rapporteur*, BKSAP DPR RI bertindak sebagai pelapor dan penghubung antara anggota komisi serta organisasi secara keseluruhan, melalui perwakilannya, BKSAP DPR RI juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan sidang, mendokumentasikan diskusi dan keputusan penting, serta menyampaikan rekomendasi hasil sidang kepada anggota komisi dan pihak-pihak terkait.

Sebagai anggota OKI, Indonesia juga berperan aktif melalui diplomasi parlemen, khususnya melalui PUIC, yang merupakan forum parlemen dari organisasi tersebut. Pada Sidang Darurat ke-5 PUIC dan pertemuan perdana Komisi Palestina APA di Teheran pada Januari 2024,

33 Nethania Simanjuntak, dan Mikhael Gewati, "DPR 'Walk Out' Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan," KOMPAS.com, 26 Maret 2024, diakses 1 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/20570341/dpr-walk-out-saat-israel-ajukan-draf-kemanusiaan-di-sidang-ipu-fadli-zon>

34 DPR RI, Laporan Delegasi BKSAP DPR RI Ke 147th IPU General Assembly and Related Meetings Luanda, 2023, diakses 20 September 2024, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/bksap-16-fa1788f392b2e84d376533cc317e1d0f.pdf>

35 VOI.ID, "Ceasefire immediately, Fadli Zon supports world parliament's visit plan to Rafah," 21 Juni 2024, diakses 18 Oktober 2024, <https://voi.id/en/news/391695>.

36 DPR RI, Laporan Delegasi BKSAP DPR RI 13th Plenary Session Asian Parliamentary Assembly BKSAP, Antalya, 2023, diakses 22 Oktober 2024, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BKSAP-13-09d0b316911b5b7a0066889712c4636b.pdf>

37 Ibid.

BKSAP DPR RI mengusulkan langkah konkret kepada parlemen-parlemen OKI dan Asia untuk menyelamatkan Palestina sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang memburuk. Ketua BKSAP DPR RI menekankan pentingnya tindakan nyata dan koordinasi yang lebih baik antara parlemen OKI dan Asia untuk memberikan dukungan politik, diplomatik, dan kemanusiaan kepada Palestina.³⁸ Adapun langkah konkret yang diserukan Indonesia meliputi dukungan penuh terhadap permohonan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, mendorong Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi hubungan dengan Israel, serta mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap produk-produk Israel.³⁹

Dalam konteks diplomasi bilateral dan multilateral yang dilaksanakan oleh BKSAP DPR RI, analisis dapat dilakukan dengan merujuk pada penelitian Jeffrey Robertson dalam *North Korean Nuclear Issues and the Role of Parliamentary Diplomacy*. Penelitian tersebut mengidentifikasi empat sifat utama diplomasi parlemen, yaitu akses, kepercayaan, fleksibilitas, dan eksplorasi non-komitmen. Dari keempat dimensi ini, tiga dimensi yakni akses, kepercayaan, dan fleksibilitas terbukti relevan dalam mendukung peran diplomasi BKSAP khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

Dalam konteks diplomasi bilateral, BKSAP DPR RI memiliki akses khusus untuk berkomunikasi langsung dengan pemangku kebijakan negara mitra, misalnya melalui kolaborasi dengan parlemen Palestina dan Amerika Serikat. Melalui pertemuan dengan anggota Kongres AS, seperti Nicholas J. Rahall, BKSAP dapat menyampaikan langsung isu kemanusiaan Gaza, sementara pertemuan dengan parlemen Palestina di Yordania membantu mengidentifikasi kondisi terkini di wilayah tersebut. Keistimewaan ini memungkinkan BKSAP untuk menyuarakan isu-isu sensitif tanpa harus terikat langsung dengan kebijakan diplomatik resmi, sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pandangan yang mungkin berbeda dari sikap formal pemerintah.

Dalam kerangka multilateral, dimensi akses diperluas melalui keanggotaan DPR RI dalam organisasi internasional seperti IPU, di mana keanggotaan Komite Eksekutif memberi Indonesia posisi strategis dalam memengaruhi keputusan global. Sebagai wakil rakyat, legislator memiliki akses unik yang tidak selalu tersedia bagi diplomat formal, memungkinkan koordinasi lintas batas yang lebih efektif dan membantu memperkuat posisi Indonesia dalam mengadvokasi isu-isu penting, seperti Palestina. Namun, kondisi ini tidak lepas dari keterbatasan. Pasalnya, keputusan akhir diplomasi berada pada pemerintah eksekutif, yang berhak mengeluarkan kebijakan formal di kancah internasional.

Kekurangan lain dari dimensi akses yang dimiliki BKSAP ialah ketidaksesuaian sikap antara Indonesia dan negara mitra terkait isu strategis, seperti Palestina. Dalam konteks ini, efektivitas diplomasi parlemen seringkali tergantung pada komitmen negara mitra dalam mengadopsi langkah yang disarankan, sehingga solusi konkret sulit tercapai bila tidak ada dukungan penuh dari pihak lain. Ini menunjukkan adanya batasan struktural dalam diplomasi parlemen yang harus disiasati untuk mencapai keberhasilan diplomasi.

Selain akses, kepercayaan adalah elemen kunci dalam diplomasi parlemen. Kepercayaan ini dibangun dari dukungan Kemlu dan mandat politik sebagai wakil rakyat. Dalam konteks

38 DPR RI, Laporan Delegasi BKSAP DPR RI: The 5th Extraordinary Meeting of the PUIC Standing Committee on Palestine Teheran, 2024, diakses 15 Februari 2024, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/bksap-16-d7f7fd9062a960b750c4bf0e1aeac90e.pdf>

39 Ibid.

bilateral, kepercayaan ini memberikan legitimasi bagi BKSAP dan GKSB DPR RI untuk mengadvokasi isu kemanusiaan, sebagaimana terlihat dalam kegiatan seperti Bulan Solidaritas Palestina, di mana keterlibatan Kemlu memperkuat mandat BKSAP untuk mengangkat isu tersebut tanpa terikat pada protokol pemerintah.

Di level multilateral, kepercayaan yang dimiliki BKSAP diperoleh melalui status sebagai anggota Komite Eksekutif IPU, yang memfasilitasi pengajuan resolusi terkait isu Palestina. Status ini memberi kepercayaan lebih pada BKSAP dalam mewakili kepentingan nasional dan publik Indonesia sekaligus menantang persepsi bahwa praktik diplomasi cenderung dibatasi oleh keprotokolan formal. Namun, meskipun posisi ini berpengaruh, efektivitasnya terbatas ketika bersinggungan dengan negara besar, seperti Amerika Serikat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya. Misalnya pada kasus kunjungan Senator Rahall.

Fleksibilitas menjadi dimensi ketiga yang penting bagi diplomasi parlemen. Dalam konteks bilateral, fleksibilitas memungkinkan BKSAP bekerja sama dengan berbagai pihak di luar pemerintah, seperti AWG, dalam diskusi tentang Palestina. Keterlibatan pihak ketiga, seperti LSM, menunjukkan kemampuan BKSAP untuk menjajaki solusi alternatif yang tidak terbatas pada jalur diplomasi resmi. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah ketika BKSAP berhadapan dengan parlemen lain, seperti Parlemen Eropa, di mana kritik BKSAP terhadap standar ganda negara Barat dalam isu Palestina menunjukkan keluwesan mereka dalam menyampaikan pandangan yang berbeda. Hal ini disampaikan dengan jelas oleh bapak Tide Aji Pratama, M.Si selaku Tenaga Ahli BKSAP DPR RI:

“BKSAP juga secara lantang menyampaikan kritik keras terhadap standar ganda yang diberlakukan oleh negara-negara Barat, bahkan ketika BKSAP berbicara dengan parlemen Uni Eropa mengenai isu-isu lain termasuk Palestina. Dalam diskusi dengan Uni Eropa, BKSAP menyampaikan bahwa selama ini negara Barat menerapkan standar ganda. Mereka meminta BKSAP untuk mendukung Ukraina, sementara di sisi lain, mereka enggan mendukung Palestina. BKSAP menekankan bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang tidak bisa melihat mana yang benar. Tentu saja, masyarakat Indonesia akan memilih Palestina.”

Pernyataan tersebut kembali menunjukkan bahwa upaya diplomasi oleh BKSAP mencoba menantang metode formal dan terstruktur pada diplomasi arus utama yang umumnya dijalankan oleh pemerintah. Pasalnya, aksi berani mengkritik mitra kerja secara langsung cenderung dihindari oleh pemerintah selaku aktor utama diplomasi.

Di sisi lain, pada konteks multilateral, fleksibilitas memungkinkan anggota BKSAP DPR RI untuk bertindak lebih inovatif dalam menangani isu-isu diplomatik di luar mandatnya sebagai wakil rakyat. Mereka dapat mengajukan inisiatif yang umum dilakukan oleh diplomat pemerintah terlepas dari status mereka sebagai wakil rakyat, misalnya dalam usulan resolusi tentang penghentian perang di Gaza dan seruan Indonesia dalam pembentukan Komisi Palestina di APA. Fleksibilitas ini juga terlihat dari kemampuan BKSAP dalam melakukan aksi protes seperti *walkout*, yang menjadi simbol penolakan atas tindakan yang dianggap melanggar prinsip kemanusiaan, tanpa mengikat sikap pemerintah secara langsung.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BKSAP DPR RI menunjukkan bahwa diplomasi parlemen Indonesia dalam konflik Israel-Palestina 2023-2024 cenderung mengalami redundansi dan pengulangan upaya, mengingat BKSAP DPR RI dan Kemlu berbagi pandangan yang sama terkait upaya diplomasi terhadap Palestina, diperkuat oleh fakta bahwa pendanaan kedua lembaga sama-sama bersumber dari kas negara. Situasi ini dapat menciptakan persepsi tumpang tindih peran, yang berpotensi mengurangi efisiensi diplomasi parlemen dalam

menghadirkan nilai tambah pada upaya penyelesaian konflik.

Namun demikian, penting untuk menegaskan bahwa diplomasi parlemen bukanlah pengganti kebijakan luar negeri pemerintah, melainkan sebuah instrumen pendukung yang memperkuat posisi diplomasi Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, diplomasi parlemen menawarkan peluang untuk memperluas jangkauan diplomasi dengan melibatkan aktor non-negara, seperti parlemen negara lain, organisasi internasional, hingga komunitas global yang memiliki kepedulian terhadap isu Palestina. Peran ini tidak hanya membantu memperkaya narasi diplomasi Indonesia, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam membela hak asasi manusia dan keadilan internasional.

Kendati terdapat hambatan, termasuk keterbatasan wewenang parlemen dalam eksekusi kebijakan luar negeri dan kebutuhan untuk menjaga sinergi dengan Kemlu, BKSAP DPR RI tetap memiliki kontribusi signifikan dalam diplomasi internasional. Parlemen dapat memanfaatkan platform multilateral, seperti IPU dan PUIC, untuk mendorong solidaritas global terhadap Palestina. Selain itu, diplomasi parlemen dapat menjadi medium untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu kemanusiaan dan perdamaian regional, sekaligus memitigasi kesan bahwa Indonesia hanya mengulangi retorika tanpa langkah konkret.

Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan struktural dan koordinatif, diplomasi parlemen tetap memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan internasional Indonesia. Usaha ini tidak hanya menunjukkan posisi Indonesia di mata dunia, tetapi juga memperkuat peran kolektif komunitas internasional dalam mencari solusi atas konflik Israel-Palestina, yang telah menjadi simbol perjuangan panjang untuk keadilan dan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran diplomasi parlemen Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina pada tahun 2023-2024 oleh BKSAP DPR RI dilaksanakan melalui dua koridor utama: bilateral dan multilateral. Upaya diplomasi parlemen yang telah dilaksanakan juga berjalan cukup signifikan, walaupun masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian.

Dalam koridor bilateral, BKSAP DPR RI mengelola 102 GKSB, termasuk satu grup yang fokus pada isu Palestina, yakni GKSB DPR RI-Parlemen Palestina. Salah satu inisiatif GKSB DPR RI-Parlemen Palestina adalah penyelenggaraan Bulan Solidaritas Palestina dan FGD, yang mendapat dukungan luas dari masyarakat Gaza. Selain itu, GKSB DPR RI-Parlemen Palestina juga aktif mengadakan pertemuan bilateral dengan berbagai pemangku kepentingan terkait isu Palestina, seperti Kemlu, misi diplomatik Palestina di Indonesia, LSM, serta dialog langsung dengan parlemen Palestina.

Secara multilateral, DPR RI juga aktif di berbagai lembaga internasional. Posisi parlemen Indonesia pada lembaga-lembaga ini sangat signifikan. Pada suatu kesempatan, DPR RI dan beberapa parlemen lain mengajukan 12 poin resolusi penghentian perang dan pelanggaran HAM di Gaza ke Setjen IPU. Usulan ini kemudian didukung mayoritas anggota sidang dengan perolehan 58% suara. Di kesempatan lain, ketua BKSAP DPR RI terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif IPU, yang memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia untuk lebih leluasa mengadvokasi isu Palestina. Selain itu, melalui keanggotaannya di APA, DPR RI turut berperan dalam pembentukan Komisi Palestina dan ditunjuk sebagai *rappporteur* dalam komisi tersebut.

Meskipun diplomasi parlemen Indonesia umumnya efektif dan diterima secara positif oleh publik, baik di dalam negeri maupun internasional, kritik terkait redundansi dan pengulangan upaya dengan Kemlu perlu mendapat perhatian. Hal ini penting mengingat kedua lembaga tersebut beroperasi dengan menggunakan kas negara, sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Assali, Khalil. "Ben-Gvir's Incendiary Moves and Statements about Jewish Prayer at al-Haram al-Sharif Raise Alarm over Status Quo." Jerusalem Story Project, 28 Agustus 2024. Diakses 14 Agustus 2024. <https://www.jerusalemstory.com/en/article/ben-gvirs-incendiary-moves-and-statements-about-jewish-prayer-al-haram-al-sharif-raise>.
- "Biased Pro-Israeli Remarks Trigger Walkout at IPU Meeting." *Tehran Times*, 24 Oktober 2023. Diakses 24 Oktober 2024. <https://www.tehrantimes.com/news/490535/Biased-pro-Israeli-remarks-trigger-walkout-at-IPU-meeting>.
- Burke, Jason. "A Deadly Cascade: How Secret Hamas Attack Orders Were Passed Down at Last Minute." *The Guardian*, 7 November 2023. Diakses 10 September 2024. <https://www.theguardian.com/world/2023/nov/07/secret-hamas-attack-orders-israel-gaza-7-october>.
- "Ceasefire Immediately, Fadli Zon Supports World Parliament's Visit Plan to Rafah." *VOI.ID*, 21 Juni 2024. Diakses 18 Oktober 2024. <https://voi.id/en/news/391695>.
- David, et al. "Pluralisme dan Toleransi: Hubungan Dagang Gus Dur Dengan Israel." *IC-TiarS: International Conference on Tradition and Religious Studies* 3, no. 1 (18 Agustus 2024): 54-64. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiarS/article/view/1186/905>.
- De Boer, Connie, and Frans Weisglas. "Parliamentary Diplomacy." *The Hague Journal of Diplomacy*. Vol. 2–2007 (1 Januari 2007): 93-99, diakses 1 September 2024, <https://doi.org/10.1163/187119007X180494>.
- DPR RI. *Buku Panduan Anggota BKSAP 2019-2024*. Jakarta: DPR RI, 2019.
- DPR RI. *Selayang Pandang Grup Kerja Sama Bilateral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: DPR RI, 2020.
- DPR RI. *Laporan Delegasi BKSAP DPR RI Ke 147th IPU General Assembly and Related Meetings*. BKSAP, Luanda, 2023. Diakses 20 September 2024. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/bksap-16-fa1788f392b2e84d376533cc317e1d0f.pdf>.
- DPR RI. *Laporan Delegasi BKSAP DPR RI 13th Plenary Session Asian Parliamentary Assembly*. BKSAP, Antalya, 2023. Diakses 22 Oktober 2024. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BKSAP-13-09d0b316911b5b7a0066889712c4636b.pdf>.
- DPR RI. *Laporan Delegasi BKSAP DPR RI: The 5th Extraordinary Meeting of the PUIC Standing Committee on Palestine*. BKSAP, Teheran, 2024. Diakses 15 Februari 2024. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/bksap-16-d7f7fd9062a960b750c4bf0e1aeac90e.pdf>.
- Hallunaj, Mirsada. "Parliamentary Diplomacy as a Helpful Instrument in Foreign Policy." *Institute for Cultural Diplomacy*, 2005. Diakses 25 September 2024. <https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Parliamentary%20Diplomacy%20as%20a%20Helpful%20Instrument%20in%20Foreign%20Policy.pdf>.
- "Indonesia Mengutuk Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel ke Komplek Masjid Al-Aqsa." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 5 Januari 2023. Diakses 22 Agustus 2024. <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4354/berita/indonesia-mengutuk-kunjungan-menteri-keamanan-nasional-israel-ke-komplek-masjid-al-aqsa-0301>.
- "Indonesia Prihatin Atas Peningkatan Eskalasi Konflik Palestina-Israel." *Antara News*, 8 Oktober

2023. Diakses 19 Oktober 2024. <https://www.antaranews.com/berita/3762543/indonesia-prihatin-atas-peningkatan-eskalasi-konflik-palestina-israel>.
- IPU. *Request Submitted by the Delegations of Algeria and Kuwait on Behalf of the Arab Group, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), and South Africa on Behalf of the African Group. Emergency Item, 147th Assembly*. 2023. Diakses 15 September 2024. <https://www.ipu.org/file/17812/download>.
- IPU. *148th IPU Assembly and Related Meetings*. IPU, Geneva, 2024. Diakses 8 Oktober 2024. <https://www.ipu.org/file/19187/download>.
- "Journalist Casualties in the Israel-Gaza War." *Committee to Protect Journalists*. Diakses 21 November 2024. <https://cpj.org/2024/02/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/>.
- Kaldor, Mary. "Human Security." *Society and Economy* 33, no. 3 (2011): 441-48. <http://www.jstor.org/stable/41472170>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Inter-Parliamentary Union (IPU)*. Diakses 3 September 2024. https://kemlu.go.id/portal/id/read/4257/halaman_list_lainnya/inter-parliamentary-union-ipu.
- Kouachi, Ikrame. "Number of Palestinians Killed in West Bank Since Oct. 7 Stands at 288 as Israeli Army Kills Young Man." *Anadolu Ajansı*, 16 Desember 2023. Diakses 4 Oktober 2024. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/number-of-palestinians-killed-in-west-bank-since-oct-7-stands-at-288-as-israeli-army-kills-young-man/3084375>.
- Lukman, Gilang. "Whither Israel's Annexation Plan: An Indonesian Perspective." *Indonesian Quarterly* 48, no. 4 (2020): 322-348.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Diplomasi Parlemen*. Jakarta: Pustaka Obor, 2020.
- DPR RI. "Grup Kerja Sama Bilateral." Diakses 31 Agustus 2024. <https://ksap.dpr.go.id/index/detail-gksb/id/183>
- Poin Rekomendasi Focus Group Discussion (FGD) Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2023. Aqsa Working Group. Diakses 25 September 2024. <https://aqsa-workinggroup.com/2023/11/02/poin-rekomendasi-focus-group-discussion-fgd-pembukaan-bulan-solidaritas-palestina-2023/>
- Pratama, Tide Aji. "Peran Diplomasi Parlemen Indonesia Terkait Isu Palestina Tahun 2023-2024." Wawancara, 2024. <https://youtu.be/b2dMcWanJrY?si=qHfmS4NxIArKNLQX>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). *Reporter Impact Since 7 October 2023*. Diakses 22 Agustus 2024. <https://www.ochaopt.org/>.
- Robertson, Jeffrey. *North Korean Nuclear Issues and the Role of Parliamentary Diplomacy. Research Note No. 23*. Canberra: Parliamentary Library, 2007.
- Sabic, Z. "Building Democratic and Responsible Global Governance: The Role of International Parliamentary Institutions." *Parliamentary Affairs* 61, no. 2 (5 Februari 2008): 255-71. <https://doi.org/10.1093/pa/gsm062>.
- "Seruan DPR terhadap AS Perintahkan Israel Hentikan Genosida di Gaza." DPR RI 19 Juni 2024. Diakses 25 September 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50098>.
- Setiawan, Irfan, and Ragil Rencoko Mahesa Putra Nainggolan. "Eskalasi Konflik Palestine-

Israel Di Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Hubungan Internasional* 17, no. 1 (19 Juni 2024): 248–63. <https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.52392>.

Simanjuntak, Nethania, and Mikhael Gewati. “DPR ‘Walk Out’ Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan.” *KOMPAS.com*, 26 Maret 2024. Diakses 1 November 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/20570341/dpr-walk-out-saat-israel-ajukan-draf-kemanusiaan-di-sidang-ipu-fadli-zon>.

Tayie, Mohammed Salman, and Ibrahim Mohammad Dashti. “Parliament and Foreign Policy-Making Process.” *Asian Social Science* 14, no. 2 (29 Januari 2018): 165. <https://doi.org/10.5539/ass.v14n2p165>.

Zon, Fadli. “Why Indonesia Can’t Normalize Relations with Israel?” *The League of Parliamentarians for Al Quds (LP4Q)*, 28 Desember 2020. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BKSAP-2-aaaeb5b5449930f3a82d3f2760d4ece0.pdf>.